



LAPORAN TAHUNAN 2018

TENTANG SMERU **3**

SAMBUTAN **5**

MOMEN PENTING
SMERU 2018 **8**

KEGIATAN UTAMA KAMI **10**

PETA CAKUPAN WILAYAH
PENELITIAN SMERU 2018 **20**

ORGANISASI KAMI **29**

LAPORAN KEUANGAN SMERU
TAHUN 2017 & 2018 **34**



FACTS MATTER
Keputusan Tepat dengan Data Akurat

LAPORAN TAHUNAN 2018

Penulis: The SMERU Research Institute

Editor: Budhi Adrianto, Fandi Muhammad H, Wiwin Purbaningrum

Foto sampul: Tony Liong/SMERU doc.

--Jakarta: Smeru Research Institute, 2019.

--40p.; 27 cm.

ISBN 978-623-7492-24-5 [PDF]

1. Laporan 2. Research

I. title II. Author

DDC'23 001.4

Diterbitkan oleh:

The SMERU Research Institute

Jl. Cikini Raya No.10A

Jakarta 10330 Indonesia

Cetakan pertama, Desember 2019



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

  @SMERUInstitute

  The SMERU Research Institute

 @riseprogramme.id





TENTANG KAMI

The SMERU Research Institute adalah sebuah lembaga independen yang melakukan studi kebijakan publik dan merupakan lembaga terdepan dalam penelitian di bidang kemiskinan dan ketidaksetaraan di Indonesia. Kerja penelitian kami berfokus pada berbagai aspek sosial-ekonomi yang sangat penting bagi isu-isu pembangunan kontemporer di Indonesia. Kami mengkhususkan diri pada analisis kemiskinan, penelitian kebijakan, dan pemantauan dan evaluasi. Ketiga elemen penghasil pengetahuan yang saling berhubungan ini diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti yang tepat bagi orang-orang paling miskin dan rentan di Indonesia.

VISI

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari kemiskinan absolut dan ketidakmerataan yang tinggi melalui penelitian yang bertujuan menghasilkan strategi, kebijakan, dan aksi penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan yang berbasis bukti.

MISI

- Melakukan penelitian mengenai berbagai isu terkait kemiskinan guna memperbaiki kebijakan publik dan swasta, serta pelaksanaannya.
- Melakukan penjangkauan efektif kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, masyarakat sipil, kalangan akademis, komunitas internasional, dan sektor swasta.
- Mendukung wacana kebijakan publik dan swasta yang inklusif mengenai strategi penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan.
- Memperkuat peran masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dan swasta.

YAYASAN SMERU

PEMBINA

Dr. Syaikhu Usman (Ketua)
The SMERU Research Institute, Jakarta

Gregory Churchill, JD (Wakil Ketua)
Konsultan hukum & dosen (purnatugas)

Dr. Joan Hardjono (Anggota)
Peneliti independen, Bandung

Dr. Sudarno Sumarto (Anggota)
The SMERU Research Institute & TNP2K,
Jakarta

Dr. Syarif Hidayat (Anggota)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Jakarta

Dr. Chris Manning (Anggota)
The Australian National University,
Canberra, Australia

Dr. Ruth Stella Petrunella Thei
(Anggota)
Fakultas Pertanian, Universitas Mataram,
Lombok

PENGAWAS

Dr. Ilyas Saad
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya,
Jakarta

Bambang Sulaksono, M.M.
The SMERU Research Institute, Jakarta



Pada Maret 2018 untuk pertama kalinya angka kemiskinan Indonesia mencapai satu digit, meskipun dalam 15 tahun terakhir tingkat penurunannya melambat. Pada periode tersebut tren ketimpangan pada berbagai dimensi ekonomi naik, sementara pertumbuhan ekonomi tersendat pada angka 5%. Ketimpangan yang cenderung tinggi mengindikasikan sebaran kue pertumbuhan tidak merata, kelompok kaya tumbuh lebih cepat daripada kelompok miskin dan rentan. Akibatnya, penurunan tingkat kemiskinan tidak bisa melaju cepat. Salah satu jalan keluar dari kondisi tersebut adalah melalui perumusan kebijakan publik berbasis bukti. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pengambilan kebijakan agar terarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperbaiki penghidupan kelompok miskin dan rentan.

Kini ruang perumusan kebijakan publik telah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Kebijakan otonomi tidak berhenti di provinsi, kabupaten, dan kota, tetapi melalui Undang-Undang No. 6/2014 bahkan sudah sampai ke desa. Artinya, praktik berotonomi sudah makin dekat kepada rakyat, yaitu otonom dalam mengurus pemerintahan dan pembangunan. Rakyat tidak lagi sekadar pemanfaat hasil pembangunan, tetapi memiliki ruang untuk berperan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Situasi ini mendorong perumus kebijakan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyusun rencana pembangunan, terutama dengan pemanfaatan hasil penelitian, bukan berdasarkan intuisi.

Komunikasi antara peneliti dan perumus kebijakan tidaklah mudah karena keduanya mempunyai prinsip, syarat, ketentuan, dan lingkungan kerja berbeda. Tahun 2018 menandai keberhasilan SMERU dalam mengembangkan keterampilan berjejaring, dan memperluas interaksi, dengan perumus kebijakan publik di pusat dan daerah, termasuk desa. Keberhasilan ini tercapai berkat kerja keras staf dan kecermatan pengorganisasian manajemen SMERU. Selain itu, dukungan berbagai pihak, terutama Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australia dan Department for International Development (DFID), Inggris telah meringankan tugas SMERU.

Dengan komunikasi intensif terbuka antara peneliti dan perumus kebijakan serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan, keterlibatan SMERU dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan publik berdasarkan hasil penelitian makin kuat dan nyata. Proses perumusan kebijakan publik seperti ini diyakini SMERU merupakan cara tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. ◆

Syaikhu Usman

Ketua

PENGURUS

Dr. Asep Suryahadi (Ketua)
The SMERU Research Institute, Jakarta

Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St (Wakil Ketua)
The SMERU Research Institute, Jakarta

Nuning Akhmadi, M.Sc. (Sekretaris)
The SMERU Research Institute, Jakarta

Hesti Marsono, M.Sc. (Bendahara)
The SMERU Research Institute, Jakarta

PENASIHAT

Prof. Boediono
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Dr. Chris Manning
The Australian National University,
Canberra, Australia

Prof. James J. Fox
The Australian National University,
Canberra, Australia

Dr. Joan Hardjono
Peneliti independen, Bandung

Prof. Gavin W. Jones
National University of Singapore,
Singapura

Prof. Gustav F. Papanek
Boston Institute for Developing
Economies, Boston, Amerika Serikat

Prof. Lant H. Pritchett
Harvard University, Cambridge MA,
Amerika Serikat

Prof. Mohamad Ikhsan
Universitas Indonesia, Jakarta

Dr. Solita Sarwono
Konsultan lepas, Wassenaar, Belanda



Bagi sebuah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik, bekerja sama secara langsung dengan pembuat kebijakan merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga. Selain memberi ruang untuk memastikan hasil penelitian digunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan, kerja sama dengan pembuat kebijakan juga akan menaikkan kredibilitas lembaga penelitian itu sendiri.

Memasuki usia ke-17 tahun, konsistensi SMERU untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik terus membuahkan hasil. SMERU telah dipercaya oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk terlibat dalam beberapa *background study* RPJMN, yang menjadi landasan bagi penyusunan dokumen RPJMN teknokratik. Sepanjang 2018 ini, SMERU terlibat dalam tiga studi yaitu Pembangunan Bidang Pemuda, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, dan Revisi Indeks Demokrasi Indonesia. Hal ini merupakan salah satu pencapaian paling nyata bagi SMERU sebagai sebuah lembaga penelitian kebijakan.

SMERU juga terus meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan memperluas jangkauannya kepada mereka, di antaranya melalui (i) pembentukan SDGs Center bersama dengan Pemerintah Provinsi dan beberapa perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat, (ii) penyelenggaraan Forum Pembangunan Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, (iii) kerja sama penelitian dengan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dalam rangka penyusunan analisis dan perumusan kebijakan pengurangan kemiskinan di kabupaten ini, dan (iv) penandatanganan nota kesepahaman dengan Kabupaten Way Kanan, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kebumen, dan Kota Bukittinggi untuk menjadi laboratorium pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah tersebut.

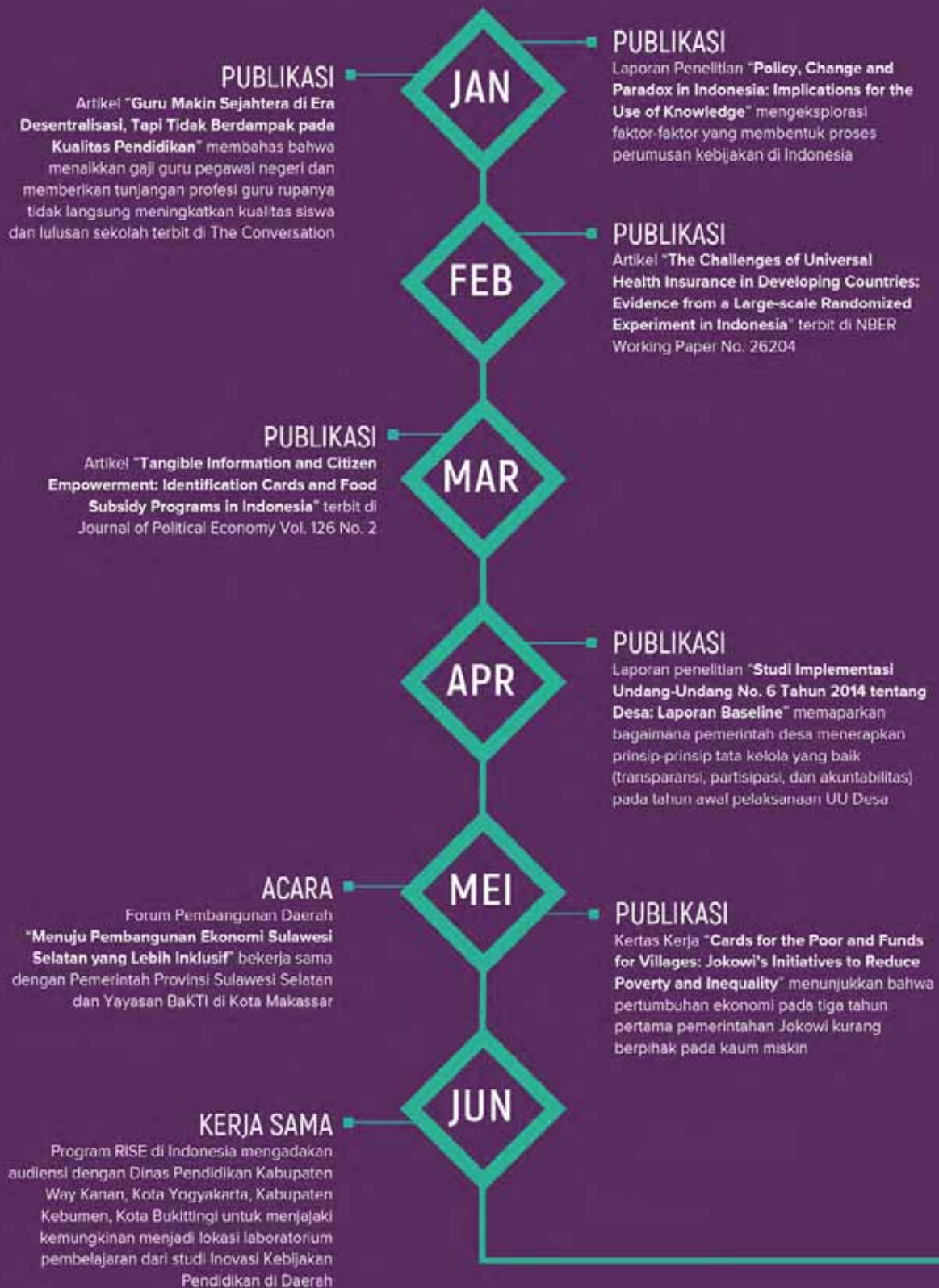
Ke depannya SMERU berencana membuka peluang kerja sama penelitian dengan sektor swasta. Sebagai langkah awal, SMERU akan menjajaki topik penelitian baru yang menjadi tren pada saat ini, yaitu ekonomi digital. Kami menilai bahwa ekonomi digital mempunyai potensi bagi penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Selain itu, SMERU akan mengembangkan layanan baru, yang mencakup metode penelitian baru, event management, diseminasi penelitian, dan pelatihan. Layanan ini direncanakan akan mulai tersedia pada pertengahan 2019.

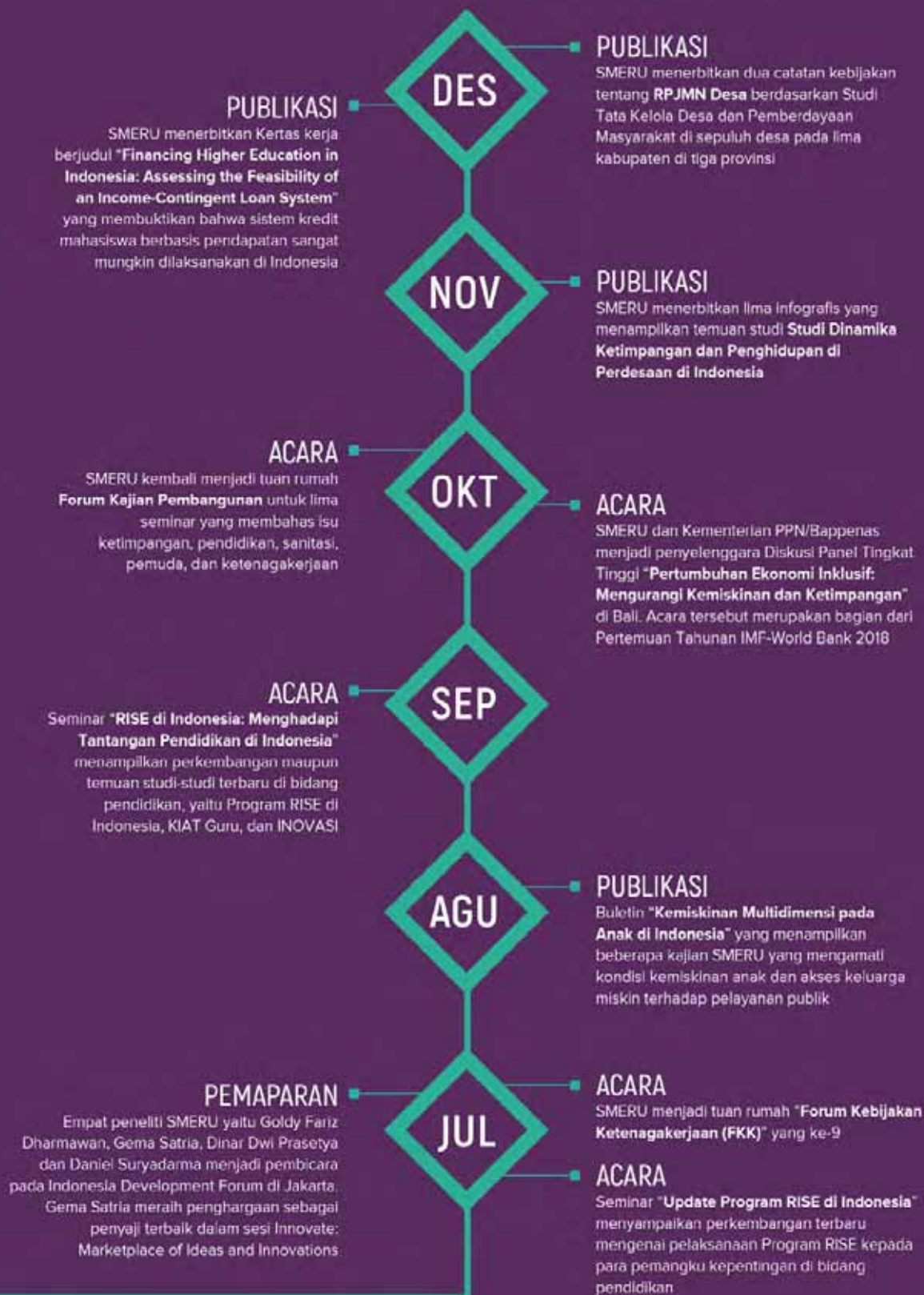
Semua capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi tinggi dari seluruh staf SMERU. Untuk itu, saya merasa bangga dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya. ♦

Asep Suryahadi

Direktur

MOMEN PENTING SMERU 2018





PENINGKATAN KUALITAS PENGAJARAN PENDIDIKAN DASAR

Program Penelitian Mengenai Perbaikan Sistem Pendidikan (Research on Improving Systems of Education or RISE program) di Indonesia yang berdurasi lima tahun telah memasuki tahun keduanya pada 2018. Studi RISE yang memperlihatkan profil pendidikan Indonesia mendapat respons yang sangat positif dari sejumlah elemen masyarakat. Puluhan berita dimuat dalam berbagai media massa tentang hasil studi RISE yang memaparkan bahwa siswa di Indonesia cenderung tidak bertambah kemampuan matematikanya setelah 12 tahun bersekolah (dari SD hingga lulus SMA). Studi tersebut mendorong munculnya berbagai gerakan masyarakat di tingkat akar rumput untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, salah satunya Gerakan Pemberantasan Buta Matematika.

Analisis kemampuan matematika, yang merupakan hasil pertama studi RISE pada 2018 berkontribusi pada perubahan paradigma di atas. Analisis tersebut menggunakan data tahun 2000 sampai 2014. Temuan pertama studi RISE adalah bahwa kemampuan matematika rendah pada awal pembelajaran. Seorang siswa kelas 1 SD, berusia tujuh tahun memiliki peluang kurang dari 30% untuk menjawab soal matematika dengan benar. Temuan kedua menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jenjang pendidikan siswa, kemampuan matematikanya sedikit sekali berkembang. Seorang siswa berumur 18 tahun yang duduk di kelas 12 hanya berpeluang 40% untuk menjawab soal dengan benar. Artinya, setelah 12 tahun bersekolah, kemampuan matematika hanya meningkat sekitar 10 poin persentase. Temuan ketiga merupakan hasil perbandingan kemampuan matematika antara kelompok tahun 2000 dan tahun 2014. Studi RISE

menemukan bahwa kemampuan matematika kelompok 2014 lebih rendah daripada kelompok 2000. Temuan ini cukup mengejutkan mengingat pendidikan telah diserahkan kepada pemerintah daerah sejak 2001. Selain itu, sejak 2009 sudah ada beberapa peraturan yang mengamanatkan peningkatan investasi pemerintah untuk pendidikan.

Pada awal 2018, Program RISE mengawali kerja sama dengan empat pemerintah daerah tingkat kota dan kabupaten, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bukittinggi. Dalam kerja sama tersebut, tim RISE dan para pemangku kepentingan di tiap daerah bersama-sama mencari tahu akar masalah pendidikan dan alternatif solusinya dengan menggunakan pendekatan *Diagnose, Design, Evaluate, and Adapt* (DDEA). Proses DDEA berhasil membantu keempat daerah tersebut merancang kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual dan berfokus pada penyelesaian masalah pendidikan. Lebih dari itu, proses DDEA oleh tim RISE dan para pemangku kebijakan di keempat daerah tersebut telah menarik perhatian pemangku kebijakan di kota dan kabupaten lain, termasuk sejumlah mitra pembangunan. Berbagai pihak tersebut menyatakan keinginan untuk bekerja sama dengan RISE, terutama dalam memperluas cakupan studi dan memfasilitasi perancangan diagnosis pada 2019 dan 2020.

Sepanjang pelaksanaan studi, RISE senantiasa mengomunikasikan temuan-temuannya kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, serta berbagai institusi nonpemerintah. RISE berharap temuan studi-studinya dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun di daerah lain. ♦



Tim RISE dan para pemangku kepentingan di daerah penelitian bersama-sama mencari tahu akar masalah pendidikan dan solusinya dengan menggunakan pendekatan *Diagnose, Design, Evaluate, and Adapt* (DDEA).

Kredit foto: Mukti Mulyana

ISU GENDER DALAM SEKTOR AIR BERSIH DAN SANITASI

Pembangunan sektor air bersih dan sanitasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Sejalan dengan tujuan ke-6 Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertenggat pada 2030, dalam RPJMN 2015–2019 Pemerintah Indonesia menetapkan target 100-0-100 dalam pemenuhan air minum dan sanitasi aman, serta penghapusan kawasan kumuh. Dalam upaya ini, isu gender merupakan hal yang sangat penting karena perempuan merupakan pemanfaat dan pengelola utama air bersih dan sanitasi. Pengalaman menstruasi, kehamilan, dan persalinan juga membuat perempuan memiliki kebutuhan air bersih dan sanitasi yang berbeda dari laki-laki. Untuk mendukung penyusunan program dan kebijakan pembangunan sektor air bersih dan sanitasi yang sensitif gender, sepanjang 2018 SMERU dengan dukungan Plan Internasional Indonesia melakukan dua studi, yaitu “Studi Kasus Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) Siswa SD dan SMP di Indonesia” dan “Analisis Kontekstual/ Penelitian Formatif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial untuk Program Water for Women (GESI-WfW).”

Penelitian MKM yang dilakukan di beberapa sekolah dasar dan menengah di Lombok Utara (NTB), Jakarta Barat (DKI Jakarta), dan Nagekeo (NTT) menemukan bahwa praktik MKM yang kurang memadai masih dilakukan oleh para siswa perempuan karena, salah satunya, fasilitas air bersih dan sanitasi yang tidak layak. Akibatnya, siswa perempuan mengalami risiko kesehatan organ reproduksi, kegiatan belajar yang terganggu, dan kesulitan untuk bersosialisasi.

Sementara itu, studi formatif GESI-WfW yang dilaksanakan di Sumbawa Barat (NTB) dan Manggarai (NTT) menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga maupun masyarakat, terkait akses air bersih dan sanitasi masih rendah. Pembagian peran dan urusan berdasarkan gender di masyarakat kurang melibatkan perempuan dalam proses perencanaan sektor air bersih dan sanitasi.

Temuan kedua studi menekankan perlunya lebih banyak aspirasi perempuan serta peningkatan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan.

Temuan dan rekomendasi studi secara khusus digunakan oleh Plan International Indonesia untuk mengembangkan program yang mereka laksanakan di daerah. SMERU juga aktif membawa isu ini dalam diskusi-diskusi kebijakan di tingkat nasional. Studi GESI-WfW didiseminasikan dalam Indonesia Development Forum 2018 yang dihadiri pemerintah, LSM, dan lembaga donor. Sementara itu, studi MKM dipresentasikan dalam Forum Kebijakan Pembangunan yang dihadiri oleh pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia), LSM, dan perwakilan beberapa sekolah di Jakarta. ♦



Perempuan merupakan pemanfaat dan pengelola utama air bersih dan sanitasi. Namun, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan—baik di tingkat rumah tangga maupun masyarakat—terkait akses terhadap air bersih dan sanitasi, masih rendah.

Kredit foto: Fatin Nuha Astini

PENGEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA

Meskipun setelah krisis ekonomi 1998 Indonesia tumbuh positif sekitar 5% per tahun, dan kemiskinan turun dari 18,41% pada 2001 menjadi 9,82% pada 2018, ketimpangan meningkat secara signifikan dari rasio Gini 0,33 pada 2001 ke 0,41 pada 2011 dan 0,389 pada 2018. Meningkatnya ketimpangan mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh kelompok kaya lebih besar daripada kelompok miskin. Menyadari situasi tersebut, selama sepuluh tahun terakhir Pemerintah Indonesia mengadopsi konsep pertumbuhan ekonomi inklusif, sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010–2014 dan RPJMN 2015–2019. Meskipun kesadaran akan pentingnya inklusivitas pembangunan meningkat, definisi dan pengukuran yang tepat dalam konteks Indonesia masih kurang.

Dengan memanfaatkan akumulasi pengetahuan dari berbagai penelitian terkait masalah kemiskinan dan ketimpangan, sejak 2017 SMERU—dengan dukungan Ford Foundation dan Knowledge Sector Initiative (KSI) yang merupakan program Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)—secara aktif membantu Bappenas mengembangkan dan menyusun Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (PEI) Indonesia sebagai rujukan untuk menilai dan mengukur inklusivitas pembangunan ekonomi di Indonesia. Indeks PEI Indonesia ini disusun dari berbagai indikator yang dikelompokkan dalam tiga pilar, yaitu: (i) pilar pertumbuhan ekonomi, (ii) pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan (iii) pilar perluasan akses dan kesempatan. Adanya definisi, ukuran, serta indikator pembangunan ekonomi inklusif

yang jelas akan memudahkan pemerintah dalam memonitor pencapaiannya dan menyusun kebijakan yang efektif dalam rencana pembangunan berikutnya. Selain penyusunan indeks berdasarkan data-data sekunder, juga dilakukan studi kasus untuk menggali akar masalah dan pandangan pemangku kepentingan di beberapa provinsi.

Pada Juli 2018, dalam Indonesia Development Forum, Menteri PPN/Bappenas meluncurkan Indeks PEI Indonesia beserta hasil penghitungan di tingkat nasional dan provinsi. Indeks dan hasil studi kasus di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Bali juga dipaparkan di High-Level Panel on Inclusive Economic Growth: Reducing Poverty and Inequality di Bali pada Oktober 2018 sebagai bagian dari IMF-World Bank Group Annual Meetings 2018. Setelah itu, SMERU masih terus mendukung Bappenas untuk menyusun Indeks PEI tingkat kabupaten/kota dan memanfaatkan Indeks PEI dalam penyusunan *background study* RPJMN 2020–2024 mengenai Pembangunan Ekonomi Inklusif. *Background study* ini bertujuan merumuskan berbagai masukan untuk penyusunan alternatif strategi dan kebijakan yang akan tertuang dalam RPJMN 2020–2024. Alternatif strategi dan arah kebijakan didasarkan pada identifikasi isu-isu strategis pada masing-masing indikator. Kemudian, arah kebijakan disusun untuk mengatasi isu-isu dalam tiga pilar PEI tersebut sehingga inklusivitas pembangunan ekonomi di Indonesia akan terus meningkat. ♦



Adanya definisi, ukuran, serta indikator pembangunan ekonomi inklusif akan memudahkan pemerintah dalam memonitor pencapaiannya dan menyusun kebijakan yang efektif dalam rencana pembangunan berikutnya. Website IPEI dapat diakses di www.inklusif.bappenas.go.id

Kredit foto: Ulfah Alifia

MENGENDALIKAN KETIMPANGAN DALAM PEMBANGUNAN DESA

The SMERU Research Institute selalu menaruh perhatian besar pada isu ketimpangan dan kemiskinan di perdesaan karena percepatan penurunan kemiskinan akan sulit diwujudkan bila ketimpangan di perdesaan tidak dikendalikan. Dua studi SMERU secara khusus menyoroti pembangunan perdesaan dan ketimpangan di perdesaan, yaitu Studi Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan pada periode 2004–2014 (dengan dukungan Yayasan TIFA) dan Studi Kualitatif Monitoring Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa yang dilakukan mulai 2015 hingga 2018 (dengan dukungan Bank Dunia).

Studi yang pertama menganalisis dinamika berbagai bentuk ketimpangan di perdesaan dengan menggunakan data-data sekunder yang tersedia untuk 2004–2014, dan menemukan bahwa pendidikan merupakan salah satu penjasar utama dari meningkatnya ketimpangan di perdesaan. Meskipun angka partisipasi sekolah di perdesaan terus meningkat, angkatan kerja berpendidikan menengah dan tinggi cenderung enggan bertahan di desa. Hal ini terjadi karena sebagian besar sektor ekonomi di desa tidak menawarkan insentif dan imbal jasa yang layak. Sebagian besar kegiatan ekonomi di perdesaan dikerjakan oleh mereka yang berpendidikan rendah. Kurangnya tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi di perdesaan menyebabkan rendahnya produktivitas kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Pada sisi lain, pemerintah telah mengucurkan dana desa yang meningkat dari tahun ke tahun, sejak Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) diberlakukan. Hasil Studi *Monitoring* Implementasi UU Desa

menemukan bahwa sebagian besar dana desa digunakan untuk perbaikan infrastruktur, seperti perkerasan jalan setapak dan saluran drainase—faktor-faktor yang menurut hasil Studi Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan justru cenderung meningkatkan ketimpangan dalam jangka pendek. Sangat sedikit dana desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang langsung mampu meningkatkan produktivitas ekonomi desa.

Dana desa sebenarnya dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian desa melalui kegiatan pemberdayaan yang sistematis. Pertama, pemerintah desa dapat menyelenggarakan pendidikan informal/nonformal bagi tenaga kerja berpendidikan rendah untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi yang masih dikelola secara tradisional. Kedua, dana desa juga dapat digunakan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru yang lebih modern, seperti usaha pengolahan, baik di sektor pertanian maupun nonpertanian. Cara ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan imbal jasa dalam berbagai kegiatan ekonomi perdesaan yang pada gilirannya akan menarik minat angkatan kerja berpendidikan menengah-tinggi. Melalui kedua upaya ini, ketimpangan di perdesaan dapat dikendalikan dan percepatan penurunan angka kemiskinan dapat terwujud.

Hasil kedua studi tersebut telah dipaparkan kepada berbagai pemangku kepentingan—baik pemerintah maupun nonpemerintah—di berbagai diskusi kebijakan. Beberapa rekomendasi kedua studi juga menjadi masukan dalam penyusunan *Background Study* RPJMN Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta kebijakan terkait lainnya. ◆



Sebagian besar penggunaan dana desa lebih banyak dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur.

Kredit foto: Siti Hidayati

PENYUSUNAN KEBIJAKAN BIDANG PEMUDA

// Investasi yang dilakukan terhadap pemuda saat ini dan perubahan terhadap cara melibatkan mereka akan secara signifikan menentukan bentuk masyarakat di masa depan. //

(Magdy Martínez-Solimán, 2017).

Pada 2025–2030 Indonesia akan menyongsong puncak bonus demografi, saat di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia nonproduktif. Investasi yang dilakukan terhadap pemuda saat ini, serta peningkatan keterlibatan mereka dalam pembangunan akan menjadi faktor penentu apakah masa puncak bonus demografi akan membawa kemajuan pembangunan bagi Indonesia atau justru membuat Indonesia terjebak dalam stagnansi ekonomi. Mengingat potensi strategis pemuda bagi pembangunan Indonesia, The SMERU Research Institute membantu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan penelitian untuk mendukung proses perumusan kebijakan kepemudaan ke depan.

Selama 2018, SMERU terlibat dalam studi untuk penyusunan Laporan *Baseline* SDG Pemuda dan Remaja di Indonesia serta *Background Study* RPJMN 2020–2024 Bidang Pemuda. Temuan dari kedua studi ini menunjukkan bahwa kondisi berbagai tantangan pembangunan pemuda Indonesia saat ini masih menghadapi keterbatasan, baik sebagai subjek maupun objek

pembangunan. Meskipun tingkat partisipasi sekolah pemuda cenderung meningkat, hanya sedikit dari mereka yang menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Kualitas pembelajaran, *link and match* pendidikan dengan dunia kerja, serta akses permodalan juga masih menjadi persoalan yang berujung pada tingginya angka pengangguran terbuka pemuda. Pemuda juga menghadapi tantangan beban ganda nutrisi dan penyakit, kerentanan terhadap kesehatan mental, penyalahgunaan obat terlarang, serta tingginya risiko cedera kecelakaan (yang menjadi salah satu penyebab kematian dan disabilitas pemuda). Pemanfaatan potensi mereka sebagai aktor pembangunan juga masih belum optimal. Partisipasi mereka dalam kegiatan sosial, dalam menyikapi isu perubahan iklim, dan penentuan kebijakan publik masih rendah.

Kebijakan yang eksplisit ditujukan untuk mengembangkan potensi pemuda mutlak diperlukan untuk memaksimalkan potensi bonus demografi tersebut, apalagi pada era perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini. Di satu sisi, ada peluang besar bahwa perkembangan teknologi akan mempercepat pembangunan kepemudaan. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut berpotensi meningkatkan kerentanan pemuda.

Sejauh ini, kedua laporan studi di atas telah menjadi rujukan Bappenas dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah Indonesia (RPJMN) di bidang kepemudaan untuk 2020–2024. Kedua laporan ini juga telah didiseminasikan dalam berbagai forum, konsultasi yang dilakukan bersama termasuk audiensi dengan Bappenas dan Seri Seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP) pada Oktober 2018. ◆



Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial, dalam menyikapi isu perubahan iklim, dan penentuan kebijakan publik masih rendah.

Kredit foto: Fatin Nuha Astini

PETA CAKUPAN WILAYAH



■ CAKUPAN NASIONAL

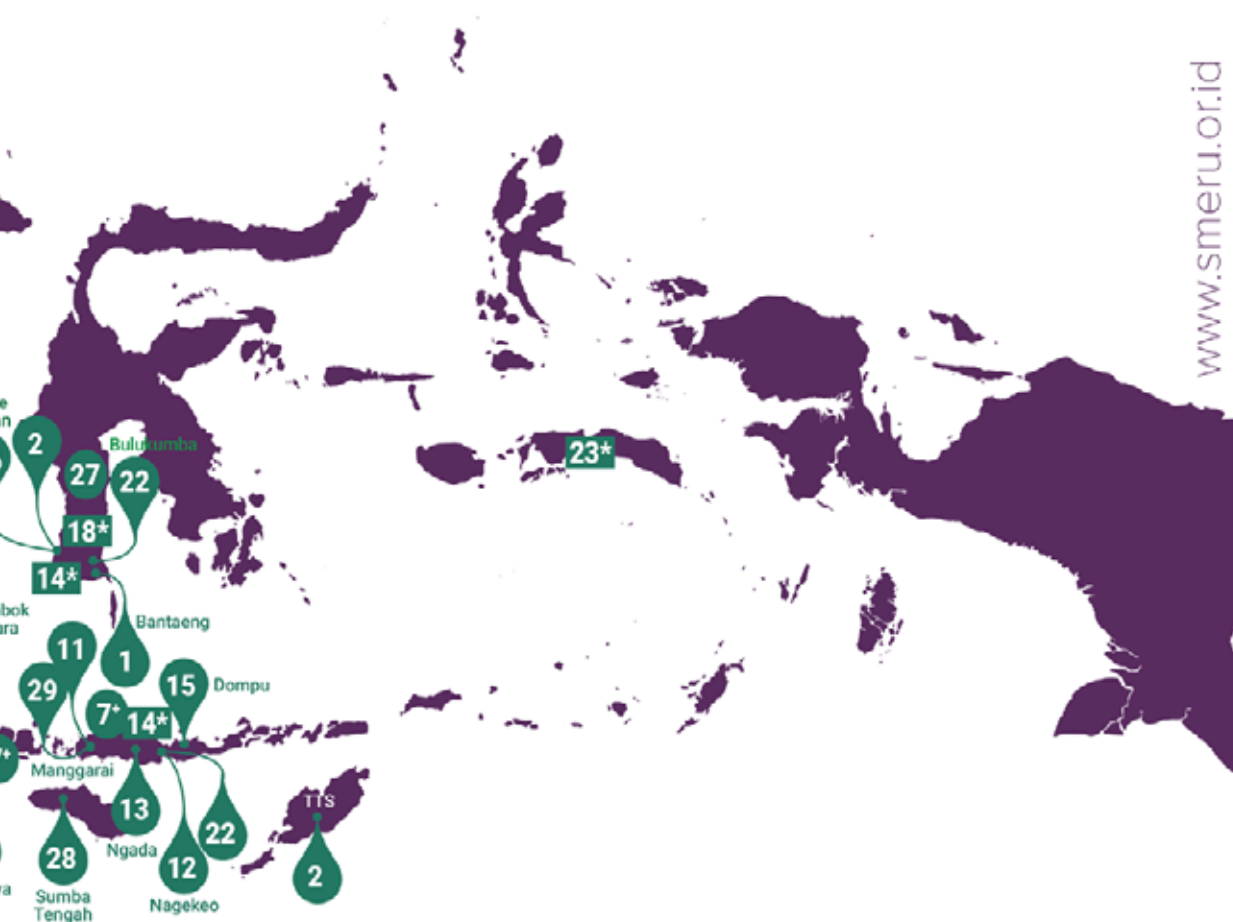
3 4 6 8 14 16 17 19 20 21 24 25

14* 18* 23* 24* dilengkapi studi kasus

7* seluruh kabupaten/kota di 4 provinsi

- 1 Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan
- 2 *Midline Study: Access to Services and Livelihood of Poor Women*
- 3 Penyusunan Catatan Kebijakan tentang Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan di Pedesaan
- 4 Naskah Akademik Pendampingan Pembangunan
- 5 *Families First Home Visiting Programme (FFHVP)*
- 6 *Training and Data Collection for PRISMA Study - Pilot*
- 7* *Training and Data Collection for PRISMA Study in 4 Provinces (Jateng, Jatim, NTB & NTT)*
- 8 *Policy Assessments in Support of National Development Strategies*
- 9 *SDG-Inequality: Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Goal 10 (Ketimpangan) DKI Jakarta*
- 10 Survei *Baseline*: Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Berbagi Pengetahuan Lembaga Anggota ARK Indonesia
- 11 *Gender and Social Inclusion (GESI) Contextual Analysis/Formative Research for the Plan's Water for Women Indonesia*
- 12 Dampak Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) dalam Mengurangi Tingkat Ketidakhadiran dan Putus Sekolah Anak Perempuan di Tingkat SD dan SMP: Studi Evaluasi dan *Baseline*
- 13 *Village Governance and Community Empowerment Study (Sentinel Villages) | Studi Tatakelola Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*

PENELITIAN SMERU 2018

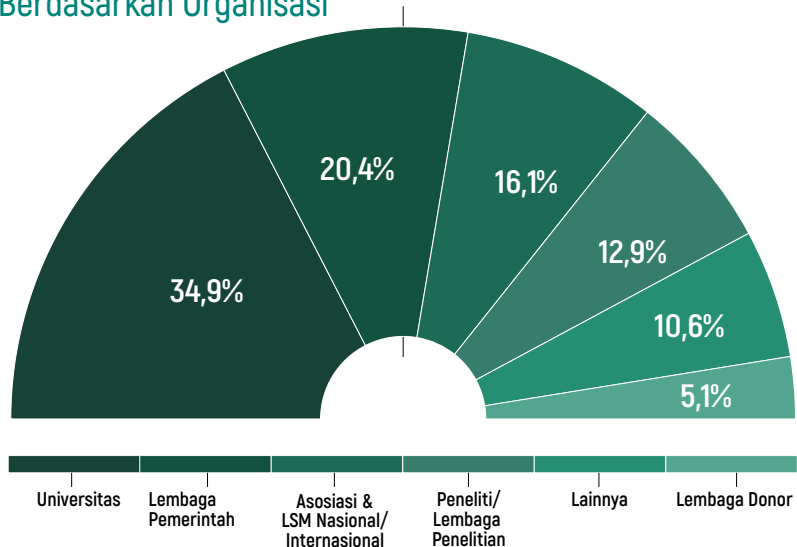


www.smeru.or.id

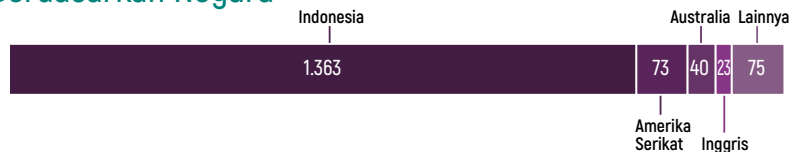
- 14*** RISE: *Evaluating How Teacher Reforms in Decentralised Indonesia can Promote Learning Gains*
- 15** *Qualitative Monitoring and Impact Evaluation of EINRIP: Post Improvement Qualitative Social Research – 2017*
- 16** *Studi Dinamika Ketimpangan di Perdesaan Indonesia | A Study on the Dynamics of Inequality at Rural Level*
- 17** *Cognitive Skills, Entrepreneurship, and Economic Growth in Indonesia*
- 18*** *Developing and Promoting Indonesian Inclusive Economic Growth Index (IIEGI)*
- 19** *Background study RPJMN 2020-2024 Bidang Pemuda*
- 20** *Studi Baseline SDGs untuk Remaja dan Pemuda | Baseline SDGs on Adolescent and Youth*
- 21** *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*
- 22** *Qualitative Monitoring and Impact Evaluation of EINRIP: Post Improvement Qualitative Social Research – 2018*
- 23*** *Background Study RPJMN: Revisi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)*
- 24*** *Background Study RPJMN: Pembangunan Ekonomi Inklusif*
- 25** *Survei Kapasitas Penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat*
- 26** *Kajian Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*
- 27** *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah: Cost effectiveness di Tingkat Provinsi*
- 28** *Case Study: Understanding Contributing Factors to Variations in Stunting Prevalence in Selected Local Governments*
- 29** *Baseline Data Collection: Water for Women*

KOMPOSISI PENGGUNA PETA KEMISKINAN 2010 DAN 2015

Berdasarkan Organisasi



Berdasarkan Negara



Pengguna Lainnya

QuePerformanceIndonesia HatfieldIndonesia
 DevelopmentResultsPteLtd Amarth
 LAZISPLNPusharlis HIPMI TheConversation
 KaryaCitaKonsultindo PTSaranaMultiinfrastruktur
 BankMandiri LuwesInovasiMandiri
 PTKiranaMegatara WarungPintar CIMBNIaga
 InternetSlim PTMaknaConsulting TanotoFoundation
 TheBridgespanGroup GamaKonsulindo TriasLintasGemilang Go-Jek
 TurunTanganJakarta AngasTelemedicine SMAN8Yogyakarta
 PTEastPointIndonesia
 LoGeO
YayasanBaitulMaalBRI
 TELKOMIndonesia BTPN Seascape KontanOnline
 Tirtto.id NovusGroup Jendelapost.com
 AirPutih MizanAmanah Sejasa TheBehaviouralInsightsTeam
 kumparan.com LingkarmerahPutih IKPBJakarta
 wartablora.com PartaiSolidaritasIndonesia
 PTIndoTambangrayaMegah TheJakartaPost
 PTCirebonEnergiPrasarana DataScienceIndonesia PRAKSIS
 YayasanibnuHajarAsqilani AgriSourceCoLtd
 PDIPCabangSumbaBarat

Penelitian Menggunakan Peta Kemiskinan

- Causes of Indonesia's Forest Fires - Ryan B. Edwards, 2018
- Spillovers from Agricultural Processing - Ryan B. Edwards, 2018
- Understanding Metropolitan Poverty: The Profile of Poverty in Jabodetabek Area - Asep Suryahadi dan Cecilia Marlina, 2018
- Changes in Land Use/Land Cover Patterns in Indonesia's Border and their Relation to Population and Poverty - Fransiscus Xaferius Herwirawan, Cecep Kusmana, Endang Suhendang, Widiatmaka

Saya mendapatkan info mengenai website Peta Kemiskinan dari status di akun sosial media rekan sesama alumnus ISPS Germany. Saat itu, saya sedang mencari data kemiskinan penduduk wilayah Solo Raya, khususnya Kabupaten Karanganyar, terkait pekerjaan saya di BPJS Kesehatan. Data kemiskinan per kecamatan ini saya gunakan sebagai acuan pendekatan ke pemerintah kabupaten dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk masyarakat miskin.

[Dina Anjayani, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah]

Beautiful maps. Would love to see all of the most recent data as soon as possible. It would also be nice to have all of the livelihood data on one table at the subdistrict level with the poverty data on a separate table.

[Michael Mackay, Kyushu Institute of Technology, Japan]

The data is good since it goes to the village level and provide not only the number of poor, but also indexes like the poverty rate, gap, severity, and Gini ratio, including the livelihood data which is really useful. There are some key inputs for improvements, such as the data needs to be updated and that it needs to be disaggregated by gender or food and nonfood poverty. Also, the village description needs to be improved by secondary data, such as the average level of education in the village, etc.

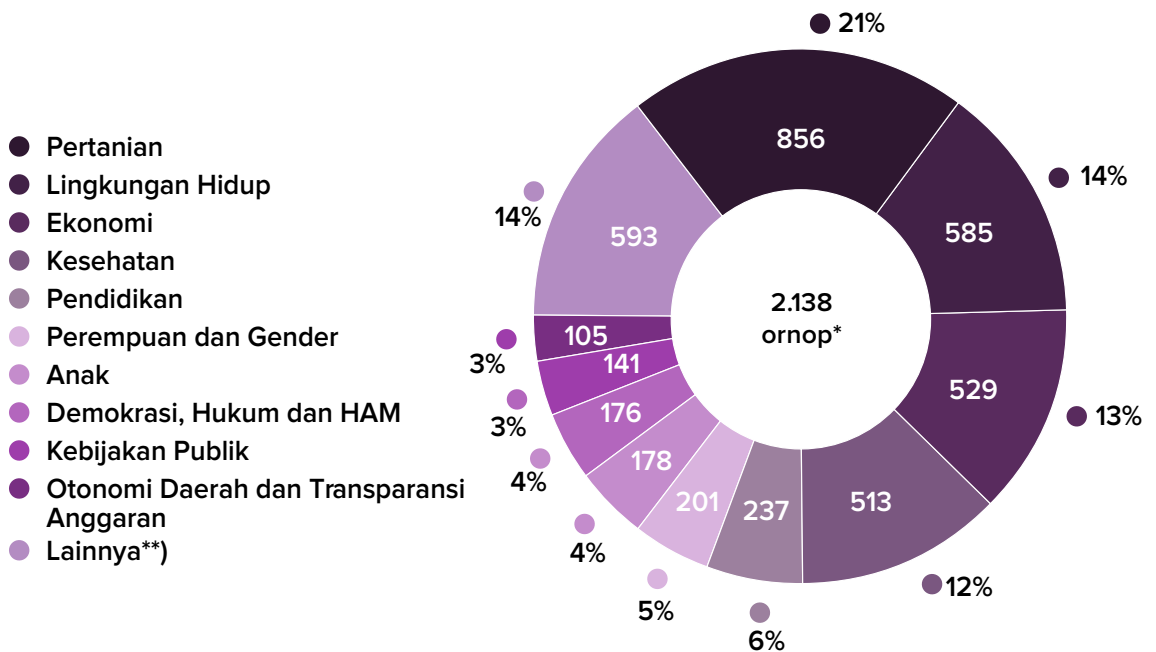
[Elwyn Panggabean, Microsave]

Saya memperoleh informasi website Peta Kemiskinan dari website SMERU. Kebetulan saya sedang mencari referensi kajian terkait kelompok marginal sehingga saya berkunjung ke website SMERU dan di dalamnya saya menemukan Peta Kemiskinan. Kebutuhan data saya pada saat itu terkait dengan kelompok marginal sehingga dengan adanya peta kemiskinan ini sangat membantu untuk menambah referensi yang saya butuhkan dalam kajian saya. Terima kasih banyak. Semoga SMERU selalu menjadi lembaga riset terbaik."

[Chasidin, Ombudsman Republik Indonesia]

DATA ORNOP DALAM BASIS DATA SMERU

Organisasi nonpemerintah (ornop atau LSM) merupakan salah satu aktor pembangunan yang perannya makin diperhitungkan oleh Pemerintah Indonesia. Menyadari hal tersebut, SMERU terus mengelola pangkalan data ornop agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Pada akhir 2018, setelah dilakukan pembaruan data, tercatat sebanyak 2.138 ornop yang terhimpun dalam pangkalan data SMERU.



Catatan:

*) Setiap LSM memiliki kegiatan di lebih dari satu sektor.

***) Meliputi sekitar 16 sektor, antara lain agraria, pangan, beragam infrastruktur, politik, disabilitas, pertambangan, bencana, dan sebagainya.

Sebagai bagian dari upaya untuk memahami kapasitas ornop dalam melakukan penelitian, pada akhir 2018 SMERU melakukan 'Survei Kapasitas Penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat'. Lembaga yang mengisi kuesioner daring tercatat 108 LSM atau sekitar 13,2% dari total LSM yang diundang mengikuti survei ini (819 LSM). Hasil survei menunjukkan bahwa LSM membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan penelitian, khususnya pada aspek-aspek sumber pendanaan, penguasaan isu dan metodologi penelitian (kualitatif dan kuantitatif), kemampuan pengolahan dan analisis data, serta publikasi pada jurnal ilmiah. ◆

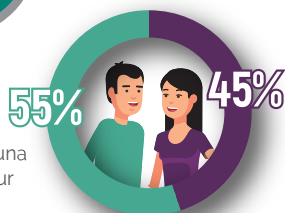
SMERU DI INTERNET



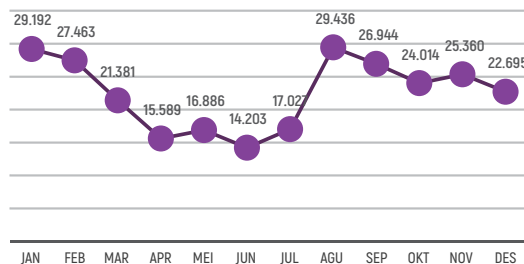
“ **LAPORAN PALING BANYAK DIBACA:**
Education in Indonesia:
A White Elephant?
Kertas Kerja, Juli 2018 *Draft*
(1.345 views)



“ Paling populer di kalangan pengguna Facebook berumur 25-34 tahun



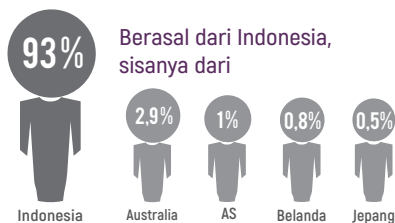
JUMLAH PAGE VIEWS PADA 2018



3.991 FOLLOWERS

40% sepanjang 2018

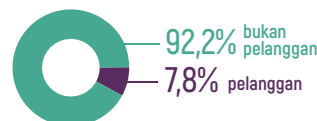
DARI MANA SAJA FOLLOWERNYA?



322 SUBSCRIBERS

83% sepanjang 2018

13.180 VIEWS



4.344 FOLLOWERS

72% sepanjang 2018



Video *live streaming* paling banyak dilihat



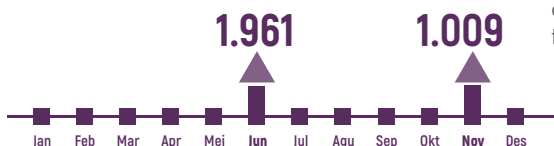
total viewing time **68.900 menit** sepanjang 2018

“ **PALING BANYAK DITONTON:**

Seminar Pembangunan di Indonesia Timur: Pelajaran Selama ini dan Beberapa Pemikiran ke Depan (**340 views**)

ENGAGEMENT TERTINGGI:

“ Hasil wawancara Harian Kompas dengan Niken Rarasati mengenai temuan Program RISE.



“ Kertas kerja Dr. Asep Suryahadi dan Ridho Al Izzati mendapat total **1.961 engagement**

Engagement yang tinggi pada kedua kicauan di atas diduga disebabkan oleh beberapa faktor:

- (i) topik ketimpangan pada saat itu sedang hangat diperbincangkan dan kritik terhadap pemerintah cenderung lebih mendapat perhatian dari masyarakat;
- (ii) SMERU mendapat keuntungan dari penyebutan hasil temuan studi RISE oleh harian Kompas;
- (iii) kicauan yang bernarasi faktual dan provokatif cenderung disukai orang. Hal ini terlihat dari *engagement rate* narasi faktual yang tinggi dibandingkan kicauan yang menggunakan narasi netral.

PUBLIKASI SMERU

LAPORAN PENELITIAN



Life in a Time of Food Price Volatility: Evidence from Three Villages in Indonesia Findings of Years 1 and 2

Rachma Indah Nurbani, Hariyanti Sadaly, Bambang Sulaksono
Desember, 2018

KERTAS KERJA



Financing Higher Education in Indonesia: Assessing the Feasibility of an Income-Contingent Loan System

Elza Elmira, Daniel Suryadarma
Desember, 2018

LAPORAN TAHUNAN 2017



Oktober, 2018

BULETIN



Pemanfaatan Dana Desa BULETIN NO.2/2018

Asep Suryahadi, Widjajanti Isdjoso, Syaikhu Usman, Nuning Akhmadi, Nina Toyamah, M. Sulton Mawardi, Palmira Permata Bachtiar, Ruhmaniyati, Joseph Natanael Marshan, Hastuti, Liza Hadiz, Gunardi Handoko

Kemiskinan Multidimensi pada Anak di Indonesia BULETIN NO.1/2018

Asep Suryahadi, Widjajanti Isdjoso, Syaikhu Usman, Nuning Akhmadi, Nina Toyamah, Luhur Bima, Meuthia Rosfadhila, Ruhmaniyati, Hastuti, Liza Hadiz, Gunardi Handoko

LAPORAN PENELITIAN



Persepsi Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus Tiga Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta

Widjajanti Isdjoso, Hastuti, M. Sulton Mawardi, Sri Budiyati, Meuthia Rosfadhila, Vita Febriany, Robert Justin Sodo
Desember, 2018

Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Laporan Baseline | *Study on the Implementation of Law No. 6/2014 on Villages Baseline Report*

Muhammad Syukri, Palmira Permata Bachtiar, Asep Kurniawan, Gema Satria Mayang Sedyadi, Kartawijaya, Rendy Adriyan Diningrat, Ulfah Alifia
April, 2018

Exploratory Study on the Impact of Conditional Cash Transfer (CCT) Program with a Child Labor Component Support in Sukabumi and Cianjur—West Java

Muhammad Syukri, M. Sulton Mawardi, Vita Febriany, Rachma Indah Nurbani, Athia Yumna, Kartawijaya
Februari, 2018

Sintesis Hasil Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Enam Kabupaten Mitra INOVASI di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hastuti, Nina Toyamah, Syaikhu Usman
Desember, 2018

CATATAN KEBIJAKAN



Memfungsikan Kembali RPJM Desa

Asep Kurniawan
Desember, 2018

Promoting Community-Based Village Supervision

Rendy Adriyan Diningrat
April, 2018

Menyederhanakan RPJM Desa

Asep Kurniawan
Desember, 2018

Reforming BPD to Strengthen Villages

Palmira Permata Bachtiar
Januari, 2018

Memperbaiki Kebijakan Padat Karya Tunai di Desa

Ruhmaniyati
November, 2018

Debottlenecking Distribution and Disbursement of the Village Fund

Gema Satria Mayang Sedyadi, Widjajanti Isdjoso
Januari, 2018

Mengefektifkan Pengawasan Desa oleh Masyarakat

Rendy Adriyan Diningrat
April, 2018

The Role of Kecamatan in Village Law Implementation

Muhammad Syukri
Januari, 2018

KETERLIBATAN SMERU DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

PUSAT

- Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
- Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
- Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
- Lembaga Administrasi Negara

DAERAH

- Pemerintah Kabupaten Way Kanan
- Kota Yogyakarta
- Kabupaten Kebumen
- Kota Bukittinggi
- Pemerintah Kabupaten Pangkep
- Direktorat Pemantauan & Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan, Pembangunan Nasional/BAPPENAS

PUSAT

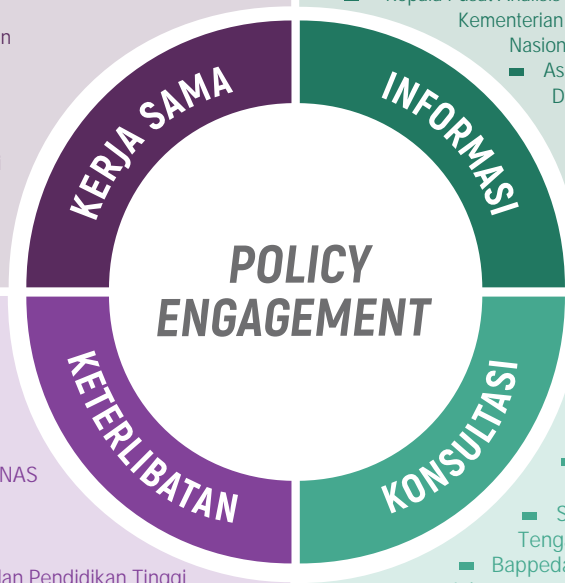
- Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
- Asisten Deputi Pemberdayaan Desa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

PUSAT

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

DAERAH

- Bappeda Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah
- Bappeda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



PUSAT

- Presiden Joko Widodo
- Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Sosial
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Hasil riset SMERU yang disampaikan pada pembuat kebijakan

PEMUDA	1	NASIONAL	PERTANIAN & PANGAN	6	NASIONAL		
PENDIDIKAN	2	KABUPATEN/KOTA	2	NASIONAL	PEMBANGUNAN DAERAH	7	PROVINSI
EKONOMI	3	NASIONAL	KETIMPANGAN	8	PROVINSI		
KEMISKINAN	4	NASIONAL	4	KABUPATEN/KOTA	DEMOKRASI	9	NASIONAL
RPJMD	5	PROVINSI					



Peluncuran Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang ditandai oleh penekanan tombol secara simbolik oleh Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas), Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSi, M.Eng. Ph.D (Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan), dan Dr. Asep Suryahadi (Direktur The SMERU Research Institute).

Kredit foto: Mukti Mulyana



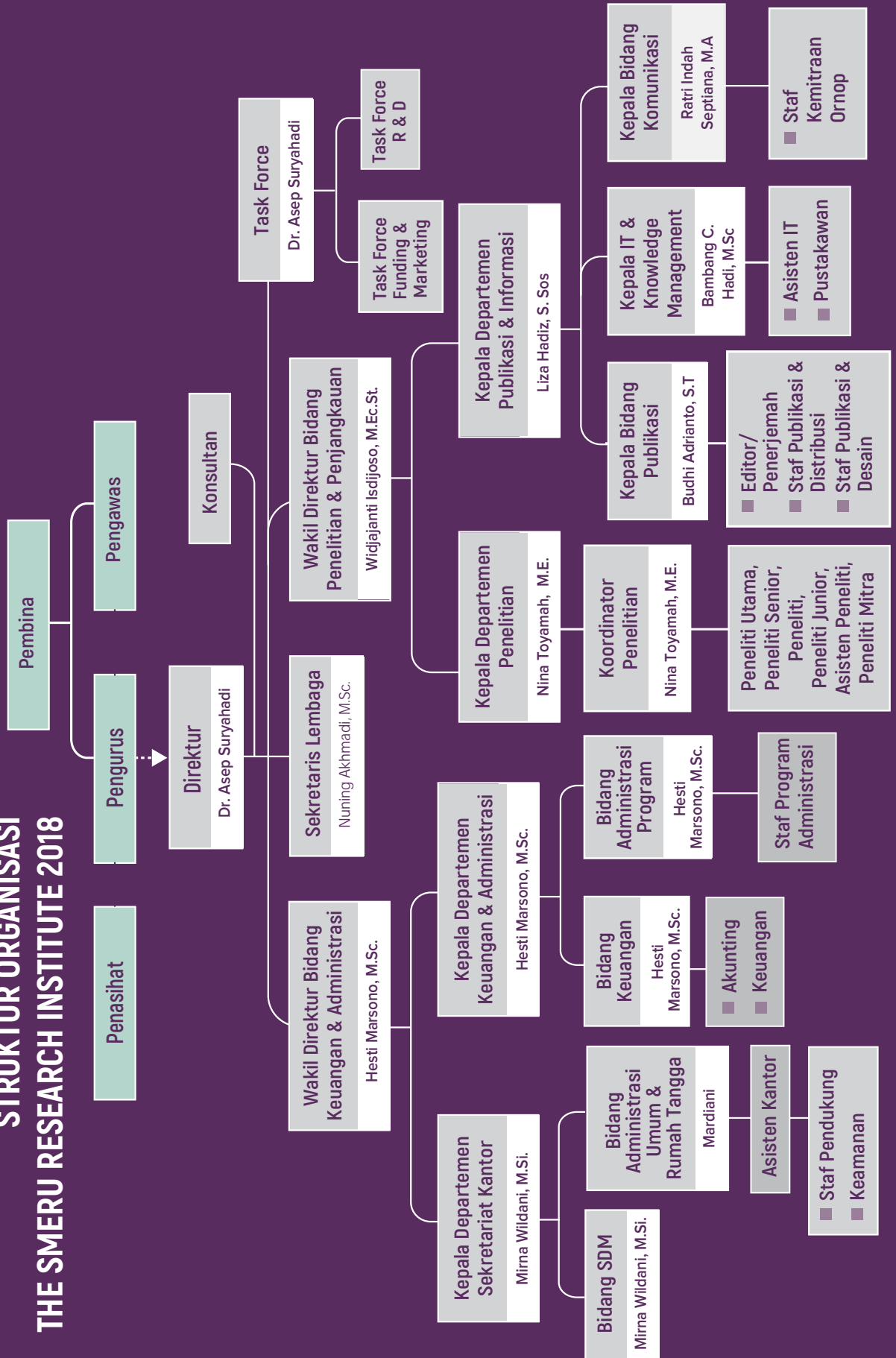
KALEIDOSKOP 2018





Keluarga besar SMERU dalam acara Annual Strategic Meeting 2018 di Puncak, Bogor

STRUKTUR ORGANISASI THE SMERU RESEARCH INSTITUTE 2018



THE SMERU RESEARCH INSTITUTE

MANAJEMEN

DIREKTUR	Dr. Asep Suryahadi
WAKIL DIREKTUR BIDANG PENELITIAN & PENJANGKAUAN	Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St.
WAKIL DIREKTUR BIDANG ADMINISTRASI & KEUANGAN	Hesti Marsono, M.Sc.
SEKRETARIS LEMBAGA	Nuning Akhmadi, M.Sc.

DEPARTEMEN PENELITIAN

KEPALA DEPARTEMEN: Nina Toyamah, M.E.

PENELITI UTAMA:

- Dr. Sudarno Sumarto
- Dr. Syaikhu Usman

PENELITI SENIOR:

- Akhmadi, M.Si.
- Athia Yumna, M.Sc.
- Dr. Daniel Suryadarma
- Luhur Bima, M.Sc.
- M. Sulton Mawardi, M.Comm.
- Palmira Permata Bachtiar, M.Phil.
- Rachma Indah Nurbani, M.A.
- Valentina Y. D. Utari, MDS

PENELITI MITRA:

- Dr. Zulfan Tadjoeddin
- Prio Sambodho, M.A. (Ph.D Candidate)
- Rizki Fillaili, M.A. (Ph.D Candidate)

PENELITI:

- Ana Tamyis, M.M.
- Asep Kurniawan, S.I.P.
- Asri Yusrina, MEcon.
- Dinar Dwi Prasetyo, M.Sc.
- Dyan Widyaningsih, S.Sos.
- Elza Samantha Elmira, MPH (Adv)
- Gema Satria, M.T.
- Hafiz Arfyanto, M.Ec.
- Ir. Hastuti
- Mayang Rizky, M.Sc.
- Meuthia Rosfadhila, M.P.P.
- Michelle Andrina, M.S.E.
- Mirza Annisa Izati, M.A.
- Nila Warda, M.Ec Pol.
- Niken Rarasati, M.Sc.
- Rendy A. Diningrat, M.Eng.
- Rika Kumala Dewi, MDS
- Risa Wardatun Nihayah, M.A
- Ruhmaniyati, S.E.
- Ulfah Alifia, M.Si.
- Yudi Fajar M. Wahyu, M.A.
- Wandira Senja Lestari, M.A.

PENELITI JUNIOR:

- Akhmad Ramadhan Fatah, B.Ec. (Hons)
- Awliya R. Hendaryanti, B.A.
- Fatin Nuha Astini, M. Si.
- Fathurrohman Arroisi, M. Si.
- Goldy Fariz Dharmawan, S.E.
- Maudita Dwi Anbarani, S.Km
- Nurmala Selly Saputri, S.Km
- Rezanti Putri Pramana, B.Sc. (Hons)
- Ridho Al Izzati, S.E.
- Veto Tyas Indrio, S.E.

DEPARTEMEN PUBLIKASI & INFORMASI

KEPALA DEPARTEMEN: Liza Hadiz, S.Sos.

KEPALA BIDANG PUBLIKASI: Budhi Adrianto, S.T.

PENERJEMAH/EDITOR:

- Gunardi Handoko
- Aris R Huang M.A.
- Alia An Nadhiva, S.Sos.
- Wiwin Purbaningrum, M.A.
- Fandy Muhammad Hizbulloh, M.Si.

STAF PUBLIKASI & DISTRIBUSI SENIOR:

- Heru Sutapa, S.Kom.

STAF PUBLIKASI & DESAIN SENIOR:

- Novita Maizir, S.Sos.

KEPALA BIDANG ICT & KNOWLEDG MANAGEMENT: Bambang C. Hadi, M.Sc.

STAF TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI JUNIOR:

- Toni Parwanto, S.Kom.

PUSTAKAWAN:

- Fitria Maharani Putri, S.Hum.

KEPALA BIDANG KOMUNIKASI: Ratri Indah Septiana, M.A.

EDITOR KOMUNIKASI SENIOR

- Mukti Mulyana, S.I.P.

STAF KOMUNIKASI:

- Tony Liong, S. Sos.

STAF KEMITRAAN ORNOP:

- Ir. Hariyanti Sadaly

DEPARTEMEN KEUANGAN & ADMINISTRASI

KEPALA DEPARTEMEN: Hesti Marsono, M.Sc.

KEPALA BIDANG KEUANGAN & ADMINISTRASI: Hesti Marsono, M.Sc.

STAF KEUANGAN SENIOR:

- Rusky Aviandhi, M.M.

STAF AKUNTING SENIOR:

- Aris Kustanto, S.E.

STAF ADMINISTRASI PROGRAM:

- Rini Kusnadi, M.A.
- Felisita Lesthe, S.Sos.

MANAJER PROGRAM:

- Romatio Wulandari, MAPCS

STAF PROGRAM:

- Nadya Novitri, S.Sos.

KEPALA DEPARTEMEN: Mirna Wildani, M.Si.

KEPALA BIDANG SDM: Mirna Wildani, M.Si.

KEPALA BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN RUMAH TANGGA: Mardiani

ADMINISTRASI KANTOR SENIOR:

- Supriyadi

ASISTEN ADMINISTRASI KANTOR:

- Arini Putri Wulandari
- Chandra Aryanti

ASISTEN KANTOR:

- Aang Ahbari
- Abdul Rokhim
- Dakim
- Gogo Margo

SOPIR:

- E. Muchtar

SATPAM:

- Abdul Hakim
- Adi Panca
- Eka Permana
- Subiyantoro





**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN**
Certified Public Accountants

License No. : 951/KM.1/2010

Jl. Pluit Raya 200 Blok V No. 1-5 Jakarta - 14440 Indonesia
Tel. : (62-21) 661-7155 Fax. : (62-21) 662-0455
E-mail : jmjkt@johanmalonda.com www.johanmalonda.com
With Offices in Surabaya, Medan and Bali



www.bakertilly.global

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Laporan No. 00390/2.0826/AU.1/11/0732-3/1/XII/2019

Report No. 00390/2.0826/AU.1/11/0732-3/1/XII/2019

Badan Pengurus
**THE SMERU RESEARCH INSTITUTE
(SMERU)**

Board of Management
**THE SMERU RESEARCH INSTITUTE
(SMERU)**

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan SMERU terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta Laporan Aktivitas dan Perubahan Aset Bersih dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan Keuangan telah disusun oleh manajemen dengan menggunakan basis akuntansi kas yang dimodifikasi yang dijabarkan pada Catatan 2a atas Laporan Keuangan.

We have audited the accompanying Financial Statements of SMERU, which comprise the Statement of Financial Position as of December 31, 2017, and the Statements of Activities and Changes in Net Assets and Cash Flows for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The Financial Statements have been prepared by the management using the modified cash basis of accounting as described in Note 2a to the Financial Statements.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Management's Responsibility for the Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan ini sesuai dengan basis Kas yang dimodifikasi yang dijabarkan pada Catatan 2a yang menyatakan bahwa basis Kas yang dimodifikasi adalah basis yang diterima untuk penyusunan Laporan Keuangan dalam keadaan ini, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these Financial Statements in accordance with the modified cash basis of accounting as described in Note 2a determining that the modified cash basis is an acceptable basis for preparation of the Financial Statements in the circumstances, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN

THE SMERU RESEARCH INSTITUTE (SMERU)

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Insitut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah Laporan Keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam Laporan Keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Insitute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the Financial Statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.


JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN
THE SMERU RESEARCH INSTITUTE (SMERU)
Opini

Menurut opini kami, Laporan Keuangan yang disebutkan diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Posisi Keuangan SMERU per 31 Desember 2017 dan Laporan Aktivitas dan Perubahan Aset Bersih dan Laporan Arus Kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan akuntansi basis kas yang dimodifikasi seperti yang dijelaskan pada Catatan 2a.

Basis Akuntansi dan Pembatasan Distribusi dan Penggunaan

Tanpa memodifikasi opini kami, kami menarik perhatian ke Catatan 2a atas Laporan Keuangan, yang menjelaskan basis akuntansi. Seperti yang dijelaskan pada Catatan 2a, SMERU menyiapkan Laporan Keuangannya dengan menggunakan basis kas yang dimodifikasi, yang merupakan suatu basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sebagai akibatnya, Laporan Keuangan tersebut mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain. Laporan kami ditujukan hanya untuk SMERU dan tidak diperkenankan untuk didistribusikan ke/atau digunakan oleh pihak-pihak selain SMERU.

JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN

NIU-KAPILicence No. 951/KM.1/2010

 Drs Johan Yoranouw
 NRAP/Public Accountant Registration AP. 0732

2 Desember 2019/December 2, 2019

Opinion

In our opinion, the Financial Statements referred to above present fairly, in all material respects, the Financial Position of SMERU as of December 31, 2017 and the Statements of Activities and Changes in Net Assets and Cash Flows for the year then ended, in accordance with the modified cash basis of accounting as described in Note 2a.

Basis of Accounting and Restriction on Distribution and Use

Without modifying our opinion, we draw attention to Note 2a to the Financial Statements, which describes the basis of accounting. As described in Note 2a, SMERU prepares its Financial Statements on the modified cash basis, which is a comprehensive basis of accounting other than generally accepted accounting principles in Indonesia. As a result, the Financial Statements may not be suitable for another purpose. Our report is intended solely for SMERU and should not be distributed to/or used by parties other than SMERU.

YAYASAN SMERU

Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2017 dan 2016

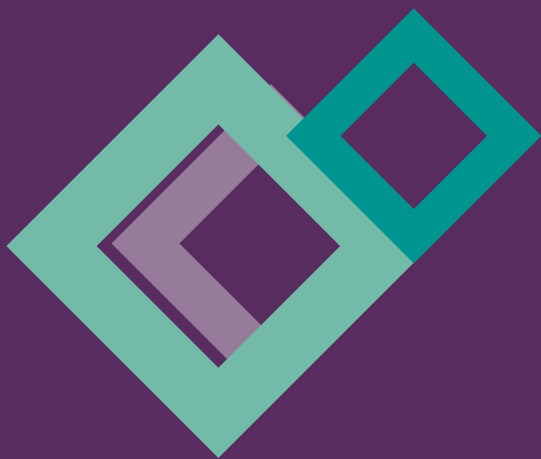
A S E T

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	10.979.452.097	21.252.273.533
Investasi Jangka Pendek	22.592.759.769	18.300.231.494
Uang Muka	-	258.500.000
Piutang	628.345.394	764.027.224
Biaya Dibayar Dimuka	250.712.880	240.081.230
Jumlah Aset Lancar	<u>34.451.270.140</u>	<u>40.815.113.481</u>
ASET TIDAK LANCAR		
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan masing-masing sebesar IDR 2.326.793.526 dan IDR 2.191.987.024 per 31 Desember 2017 dan 2016	□ □ 8.572.077.374	8.060.051.879
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>8.572.077.374</u>	<u>8.060.051.879</u>
JUMLAH ASET	<u>43.023.347.514</u>	<u>48.875.165.360</u>
LIABILITAS DAN ASET BERSIH		
	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang Pajak	143.262.100	96.800.800
Utang Lain-lain	5.374.760	118.269.776
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	□ 20.774.500	87.490.704
Kewajiban Imbalan Kerja	2.667.320.000	2.510.420.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>2.836.731.360</u>	<u>2.812.981.280</u>
ASET BERSIH		
Tidak Terikat	11.880.329.976	24.311.654.147
Terikat Temporer	□ 28.179.516.503	21.623.760.258
Terikat Permanen	126.769.675	126.769.675
Jumlah Aset Bersih	<u>40.186.616.154</u>	<u>46.062.184.080</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH	<u>43.023.347.514</u>	<u>48.875.165.360</u>

YAYASAN SMERU

Laporan Aktivitas & Perubahan Aset Bersih per 31 Desember 2017 dan 2016

	2017			2016	
	Tidak Terikat	Terikat Temporer	Terikat Permanen	Jumlah	Jumlah
PENERIMAAN					
Hibah	4.431.974.488	11.953.024.748	-	16.384.999.236	21.462.612.027
Penerimaan Lainnya	2.035.668.921	-	-	2.035.668.921	661.596.030
Laba (Rugi) Yang Belum Direalisasi	87.150.426	-	-	87.150.426	76.423.232
2d & 4					
Jumlah Penerimaan	6.554.793.835	11.953.024.748	-	18.507.818.583	22.200.631.289
PENGELUARAN					
Biaya Program	2.677.353.995	5.397.268.503	-	8.074.622.498	10.852.983.110
Biaya Operasional	15.752.446.524	-	-	15.752.446.524	12.003.718.662
Biaya Penyusutan	134.806.502	-	-	134.806.502	119.864.509
Biaya Lainnya	421.510.985	-	-	421.510.985	516.788.516
Jumlah Pengeluaran	18.986.118.006	5.397.268.503	-	24.383.386.509	23.493.354.797
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH	(12.431.324.171)	6.555.756.245	-	(5.875.567.926)	(1.292.723.508)
ASET NETO AWAL TAHUN	24.311.654.147	21.623.760.258	126.769.675	46.062.184.080	47.354.907.588
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	11.880.329.976	28.179.516.503	126.769.675	40.186.616.154	46.062.184.080



DEWAN REDAKSI

Asep Suryahadi
Widjajanti Isdijoso
Hesti Marsono
Nuning Akhmadi
Syaikhu Usman
Nina Toyamah
Liza Hadiz

REDAKSI

Pengumpul Data

Ratri Indah Septiana
Felisita Lethe
Rini Kusnadi

Editor

Budhi Adrianto
Fandi Muhammad H
Wiwin Purbaningrum

Desainer Grafis

Novita Maizir

Staf Distribusi


Heru Sutapa

Foto Sampul

Tony Liong



 Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330, Indonesia

 +6221 3193 6336;
+6221 3193 0850 (fax)

 smeru@smeru.or.id

 www.smeru.or.id

  @SMERUInstitute

  The SMERU Research Institute

 @riseprogamme.id

